

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TRIWULAN IV

UNIT ESELON I : **BADAN KETAHANAN PANGAN**

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMALUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Konsumsi Beras Per Kapitan Tiap Tahun	1,50 %	0	0	0	0	53,02	1. Proses Pencapaian, 2. Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publik pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
			1 Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6.698 Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	desa baru 141 desa lama 59	desa baru 1.031 desa lama 2.291		1. Proses Pencapaian, 2. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	
			2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16-Jan Provinsi 21 Kab/Kota	0	0	0	16	100,00		
	3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33 Provinsi	0	0	0	33	100,00				
	B Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3									
	1 Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6.698 Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 1.030 Desa, Desa Lama : 2.291 Desa	1.335 3.789	86,96	1. Proses Pencapaian lancar, 2. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
	2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16 Provinsi 21 Kab/Kota	0	0	0	16	100,00				
	3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33 Provinsi	0	0	0	33	100,00				

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMALUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	1 Kawasan Mandiri Pangan	1 %	Jumlah penduduk rawan pangan 47.020.098 jiwa (19,04%)	0	0	13	100,00	Konsumsi beras menurun dari 96,3 kg (2013) menjadi 96,2 kg (2014) atau sebesar 0,1%. Dengan adanya peningkatan standar kebutuhan rata-rata	data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas (BPS) yang akan publish pada triwulan I dan III	
		13 Provinsi		0	0	13			Belum semuanya provinsi menyerahkan SP2D ke pusat	1 Koordinasi dengan BKP Pusat, 2 Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3 Terhant SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran
		109 Kawasan		0	0	109	64	Proses Pencairan Desa Mandiri Pangan		
	2 Pengembangan Lumbung Pangan	652 Lumbung		0	0	93,58	Proses Pencairan Lumbung Pangan			
				0	0	0	Proses Pencairan Lumbung Pangan			
	B Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun	1,50%		0	0	0	Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publish pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV		
	1 Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6.598 Desa	Desa Baru : 16, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	53,20	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat di tingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabu menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1 Koordinasi dengan BKP Pusat, 2 Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3 Terhant SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
	2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9 Provinsi 21 Kab/Kota	0	0	0	10,00				
	3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33 Provinsi	0	0	33	100,00	Sosialisasi			

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAUJUDAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
C	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3	0	0	0	0	<p>Skor PPH meningkat dari tahun 2013 (81,4) menjadi 83,4 pada tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target 93,3 maka skor tersebut baru dicapai oleh penduduk dengan pengeluaran rata-rata perkapita diatas Rp. 750.000,-. Skor PPH rata-rata nasional belum mencapai target karena konsumsi pangan hewani, buah dan sayur masih rendah</p>	Data penduduk miskin tergantung data BPS dan data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas yang akan publik di triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV		
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698 Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	59,201	1. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan. 2. Adanya arahan penundaan percepatan banjos setelah Pemilihan Legislatif. 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah. 4. Dengan sistem SPAM dan sliabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat. 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya. 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16-lan Provinsi	0	0	0	16	100,000	Sosialisasi dan Penyiapan dokumen		
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	21 Kab/Kota 33 Provinsi	0	0	0	21 33	100,000			
D	Stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya	Sesuai dengan HPP	0	0	0	0				
1	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	417 Gapoktan	0	37 Tahap Penumbuhan dan 78 Tahap Pengembangan	0	0	88,000	1. Adanya arahan penundaan percepatan banjos setelah Pemilihan Legislatif. 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah. 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat. 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya. 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
2	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	652 lumbung	0	sda LPM	dicapai dari LPM	0	93,581	Tahap Pencairan		

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
E	Stabilnya harga beras di tingkat produsen	CV < 10 %	0	CV = 8,09%	CV = 8,14%	CV = 7,96%	100,00	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data panel harga pangan BKP, pada periode Oktober- Minguu II Desember 2014 (Triwulan IV), rata-rata <i>coefisien variansi</i> (CV) harga beras medium ditingkat pengendalian sebesar 7,96%, yang berarti harga beras masih stabil. Apabila dibandingkan Triwulan II, kondisi harga pada Tri IV lebih stabil terlihat dari nilai CV Tri IV lebih rendah dari Tri III Rata-rata harga tertinggi terjadi pada bulan Desember (minggu II), yaitu Rp 9.200/kg (Kalmantan Barat), dan harga terendah pada bulan Oktober (Minggu II), yaitu Rp 6.300/kg (Sulawesi Tenggara). 	<p>Masih adanya petugas enumerator kabupaten yang tidak mengirimkan data perkembangan harga beras ditingkat produsen (penggunaan) secara rutin (mingguan) ke Pusat.</p> <p>Masih adanya perbedaan harga gabah/ beras pada awal tahun 2015 (Jan-Maret) mengingat belum musim panen, sehingga berdampak pada fluktuasi harga beras baik di produsen maupun konsumen.</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengirman data harga.</p> <p>2. Validasi data harga oleh petugas harga BKP Pusat/ Provinsi.</p>
1	Laporan Kondisi Harga	34 Laporan	0	34	34 Lap.	100,00	<ul style="list-style-type: none"> Data harga pangan strategis yang diperoleh dari enumerator ditingkat konsumen (pasar) dan ditingkat produsen (petani/penggunaan) <p>Laporan mungguan yang dirangkap menjadi laporan bulanan dan trwulan tentang harga pangan sudah tersedia dari 33 provinsi dan 1 pusat.</p>	<p>1. Masih adanya petugas enumerator (provinsi/ kab/ kota) yang tidak mengirim data perkembangan harga pangan secara rutin (mingguan) ke Pusat.</p> <p>2. Masih adanya petugan petugas enumerator sehingga pengiriman data harga menjadi terganggu (tidak rutin), dan</p> <p>3. Masih adanya data yang dikrim kurang valid, sehingga perlu divalidas/ditohah kembali!</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengirman data harga.</p>	